

BAB IV

PERBANDINGAN STRATEGI PERJUANGAN

SUTAN SJAHRIR DAN TAN MALAKA PADA

MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

DARI TAHUN 1945-1948

4.1. Latar Belakang Pemikiran Politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka

4.1.1. Perkembangan Ideologi di Eropa

Sutan Sjahrir dan Tan Malaka merupakan dua contoh tokoh nasional yang memberikan segenap tenaga dan pikirannya pada masa kemerdekaan. Kajian terhadap pemikiran dua tokoh tersebut, tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan masa lalunya yang pernah merasakan pendidikan di Eropa. Pada abad ke 20, di Eropa berkembang beberapa ideologi besar yang berkembang pesat, diantaranya Liberalisme dan Sosialisme. Dua ideologi saling bersaing memperebutkan pengaruh maupun kekuasaan di kalangan masyarakat. Selain ideologi Liberalisme dan Sosialisme, berkembang juga Fasisme, ideologi yang dianut negara Italia dibawah Bennito Mussolini, yang dikemudian hari diikuti oleh Spanyol dan Jerman. Pertentangan antar ideologi yang ada, turut dirasakan pengaruhnya oleh Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang cukup lama tinggal di Eropa.

Pada abad ke 15, Eropa mengalami masa renaissance (kelahiran kembali), banyak kemajuan yang terjadi mulai dari bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sistem pelayaran, perdagangan serta pemikiran (Syam, 2007 :99). Salah satu hasil dari perkembangan pemikiran adalah munculnya paham liberalisme, yaitu suatu paham yang memberikan

kebebasan kepada individu atau seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban. Paham liberalisme mengalami perkembangan pesat pada abad ke 18 dengan terciptanya beberapa paham dalam beberapa aspek, diantaranya :

- 1). Ekonomi yang dikenal dengan Kapitalisme, suatu paham yang menjamin kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
- 2). Agama melahirkan paham sekulerisme yaitu suatu paham yang mementingkan kehidupan dunia (materialisme).
- 3). Bidang politik menciptakan paham demokrasi, yaitu suatu paham dalam bidang politik yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh rakyat melalui pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Ajaran Liberalisme memberikan kebebasan individu dalam melakukan segala aktivitas tanpa campur tangan negara. Masyarakat pada dasarnya dapat dianggap dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan negara hanya merupakan suatu langkah atau solusi, apabila usaha sukarela dari masyarakat mengalami kegagalan (Syam, 2007 : 252).

Paham Liberalisme selain memberikan keuntungan terutama menciptakan kreativitas dan daya saing antar individu dalam bidang ekonomi, politik dan ilmu pengetahuan, ternyata juga menimbulkan dampak lain bagi kehidupan masyarakat dunia, seperti Pertama, sikap ingin menguasai daerah lain (penjajahan); Kedua, munculnya kaum pengusaha / borjuis dan buruh / pekerja, dimana kaum pengusaha atau borjuis mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari tenaga buruh yang bekerja kepadanya. Dampak lainnya adalah sikap individualisme, konsumerisme, melemahnya ikatan emosional dalam keluarga, ketimpangan ekonomi antara kaum borjuis dan buruh.

Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh paham Liberalisme inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan munculnya Sosialisme. Paham Sosialisme ini dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Liberalisme maupun Kapitalisme (Syam, 2007 : 267).

Sosialisme adalah suatu paham yang mementingkan kepentingan umum maupun masyarakat diatas kepentingan individu. Sosialisme, pada hakikatnya bersumber dari kepercayaan diri masyarakat, bahwa segala penderitaan dan kemelaratan dapat dihadapi dan dihapuskan. Penderitaan dan kemelaratan yang diakibatkan oleh dominasi politik dan ekonomi oleh penguasa dan pengusaha dengan semangat Liberal dan Kapitalismenya, mendorong sebagian orang mencari cara baru guna memecahkan masalah tersebut tanpa harus dilakukan dengan kekerasan. Tokoh-tokoh Sosialisme diantaranya adalah Saint Simon (1790-1873), mengusulkan perlunya sarana-sarana produksi agar dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah; Robert Owen (1771-1858), aktif memperjuangkan perbaikan seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian permasalahan antara kaum kapitalis dengan buruh. Tokoh lainnya adalah Marie Charles Fourir, Bakunin dan Thomas Moore (Syam, 2007 : 275-276).

Sosialisme dalam bidang politik berpandangan bahwa manusia sebagai individu dari kelompok massa dan menolak adanya pembagian kelas proletariat yang dianggap sebagai omong kosong belaka. Pandangan lain yang dikemukakan oleh ideologi ini adalah kepemilikan alat-alat produksi oleh negara harus diusahakan secara perlahan-lahan atau secara bertahap, menolak penguasaan kekuasaan oleh sekelompok minoritas, menuntut pendirian umum bahwa pencabutan hak milik warga negara harus melalui proses hokum dan warga negara tersebut harus mendapat kompensasi. Sedangkan dalam

bidang ekonomi, sosialisme memiliki beberapa pandangan diantaranya : Pertama, pemerataan sosial yaitu menentang ketimpangan kelas sosial misalnya ketimpangan antara kaum borjuis dan buruh; Kedua, penghapusan kemiskinan yang banyak dialami golongan petani dan buruh. Oleh sebab itu sosialisme sebagai kekuatan politik dan sosial sangat berpihak kepada tindakan populis terhadap rakyat, ini dilakukan berupa memperjuangkan kesempatan kerja, perbaikan nasib, penghapusan diskriminasi, persamaan hak, menghapuskan persaingan dan mengatur mekanisme ekonomi untuk kepentingan seluruh masyarakat (Henriete dan Schalk, 1952 : 2).

Sosialisme semakin berkembang di awal abad ke 19-20, apalagi kemudian dengan diterbitkannya buku berjudul *Manifesto Komunis* karangan Karl Marx dan Frederich Engels. Saat itu Karl Marx memperkenalkan konsep sosialisme baru yang dikenal dengan Komunisme. Komunisme berasal dari kata komune (*commune*), yaitu suatu kesatuan pemerintahan sendiri dengan negara sebagai bagian dari kesatuan tersebut dan menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Marx menyatakan bahwa sejarah seluruh manusia yang ada tidak lain adalah perjuangan kelas (Syam, 2007 : 281).

Kelahiran sosialisme dianggap sebagai berkah bagi kaum petani, buruh dan proletar, yang selama ini banyak dirugikan oleh sistem kapitalis, tak terkecuali oleh dua pemuda Indonesia yaitu Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang terpengaruh akan nilai-nilai sosialisme dengan semangat *Zeitgeist* (semangat zaman) di Eropa pasca Perang Dunia Pertama (1914-1918), yakni suatu paham Marxisme yang menimbulkan iklim perjuangan untuk memperbaiki nasib buruh yang dieksploitasi oleh kapitalis. Slogan yang terkenal saat itu “Kaum Ploteraait seluruh dunia (bersatulah). Marxisme merupakan teori yang

berasal dari Teori Karl Marx, ahli filsafat Jerman, yang hidup dari tahun 1818-1883, Marx menulis tentang masalah kelas pekerja yang diberi nama kaum proletar.

Dalam memperdalam pengetahuan mengenai sosialisme, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka banyak berteman dengan teman-teman golongan radikal kiri, suatu kalangan yang mengharamkan hal-hal berbau kapitalis dan kolonialisme (penjajahan). Dilihat dari konteks sejarahnya, sosialisme merupakan gagasan politik kiri pada masa itu yang menjadi representasi pemikiran progresif dikalangan kaum terpelajar Indonesia dalam menghadapi kolonialisme, yang dianggap sebagai perkembangan lanjut dari kapitalisme. Dengan sendirinya, orang-orang yang menolak kolonialisme akan cenderung juga menolak kapitalisme sebagai induknya. Kapitalisme dan kolonialisme dianggap sebagai kekuatan yang cenderung mengeksploitasi manusia atas manusia dan akan menghasilkan kemakmuran dan kejayaan untuk pemilik modal dan penderitaan bagi sebagian besar orang-orang yang hanya mempunyai tenaga-kerja.

Masyarakat modern terutama masyarakat industri, kaum kapitalis tidak hanya menentukan tujuan ekonomi masyarakat tetapi secara politik menguasai dan menetapkan ukuran serta nilai-nilai sosial. Tujuannya tiada lain untuk mempertahankan ideologi dan kepemilikan harta kekayaan kaum kapitalis. Begitu juga dengan imperialisme, terjadi karena kepentingan dan persaingan ekonomi, dan ini merupakan aspek inti kapitalisme. Sejarah telah mencatat berbagai penaklukan kolonial yang dilakukan negara-negara kapitalis maju seperti Belanda, Inggris dan Perancis dalam abad ke 18 dan 19 dapat dihubungkan dengan kekuatan ekonomi. Analisis Marx yang terpenting adalah materi atau ekonomi menentukan perkembangan dan perubahan sejarah. Itulah sebabnya bila imperialisme dan kapitalisme akan dihancurkan, faktor produksi mereka harus direbut

melalui revolusi melalui perjuangan kelas buruh. Tapi sampai akhir hayatnya Karl Marx tidak bisa mewujudkan cara dalam membentuk masyarakat sosialisme. Baru kemudian pada awal abad ke 20, seorang tokoh bernama Vladimir Ilyich Lenin mengobarkan Revolusi Bolshevik di Rusia (Syam, 2007 : 288).

Pada tahun 1917, terjadi revolusi sosial-politik di Rusia, kekuasaan monarki dibawah pimpinan Tsar Nicholas II dijatuhkan oleh kelompok Sosial-Revolutioner pimpinan Kerensky. Tapi kemudian, Kerensky dan Sosial-Revolutionernya dikalahkan oleh kelompok Bolshevik, yang beraliran sosialisme-komunisme, yang dipimpin Lenin, Stalin dan Trotsky. Keberhasilan Bolshevik menyebabkan Lenin, Stalin dan Trotsky menjadi pucuk pimpinan tertinggi Rusia. Sejak tahun 1917, Rusia menganut sistem Sosialisme-Komunisme yang berlanjut penerapannya pada kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara teoritis, pemerintahan komunis secara ideologi bertujuan menciptakan masyarakat sama rata-sama rasa, masyarakat tanpa kelas serta tanpa hisap-menghisap. Apabila Marx menekankan bahwa revolusi sosial hanya terjadi di negara maju (kapitalis), maka Lenin membantah hal itu dengan membuktikan timbulnya Revolusi Bolshevik 1917 pada Rusia, sebuah negara feodal dan sistem perekonomiannya bertumpu pada agraris serta belum masuk dalam tahap industri maju.

Keberhasilan menumbuhkan paham komunisme di Rusia berlanjut pada di perlukannya “pengorganisasian revolusi“. Penanaman solidaritas terhadap buruh dalam doktrin komunis telah disebutkan oleh Marx dan Engels dalam kalimat “ kaum buruh bersatulah”. Trotsky berpendapat bahwa komunisme hanya mungkin dapat berkembang, jika seluruh dunia berhasil dikomunikasikan. Oleh karena itu Lenin kemudian memelopori berdirinya Komunis Internasional (Komintern). Dalam membawa misi komunismenya

untuk mencapai dan menguasai politik, sosial dan ekonomi masyarakat dan negara, Lenin bersama Stalin serta Trotsky menjadikan paham komunisme sebagai sebuah partai politik yang memiliki beberapa tugas maupun wewenang, diantaranya :

- 1). Melaksanakan kegiatan propaganda bahwa komunis adalah partai rakyat yang mengabdikan pada kemerdekaan, demokrasi dan keadilan sosial.
- 2). Anggota dan kader partai diperintahkan melakukan penyusupan ke dalam lembaga lain, misalnya militer, serikat kerja dan pemerintahan.
- 3). Mengutamakan perebutan kekuasaan melalui kekerasan yang disebut jalan kekerasan kolektivitas untuk meningkatkan produksi melalui mekanisme pertanian kolektif daripada usaha kecil perseorangan, adanya penyesuaian pertanian dengan industri yang milik perseorangan kepada kepemilikan negara, membentuk petani yang bebas / merdeka menjadi proletar pertanian yang terikat guna pengawasan dan pengaturan, sekaligus menjadi kader partai secara resmi yang memiliki tugas melakukan penyusupan ke organisasi lawan politik.

Pada tahun 1924, pemimpin tertinggi komunis Rusia Lenin meninggal dunia, sepeninggal Lenin dalam tubuh partai komunis timbul perpecahan antara kelompok Joseph Stalin dan Trotsky, yang antara kedua kelompok terdapat perbedaan pandangan dalam melaksanakan program partai komunis. Stalin menghendaki Rusia (Uni Soviet) menjadi negara kuat dan besar sebelum mengeksport ideologi komunis ke seluruh dunia, sedangkan Trotsky berpikiran bahwa paham komunis bebas tumbuh dimana saja tanpa harus menunggu Uni Soviet. Persaingan antara kedua tokoh komunis tersebut akhirnya dimenangkan oleh Joseph Stalin.

Perkembangan sosialisme yang pesat di awal abad ke 20 di berbagai Negara terutama Eropa berkembang menjadi berbagai macam bentuk, diantaranya : Pertama, Sosialisme-Demokrat, yaitu suatu paham yang menjunjung tinggi hak milik masyarakat sekaligus menghargai hak kebebasan individu; Kedua, Komunisme, yaitu suatu paham dan pemikiran yang menekankan bahwa kekuasaan Negara di atas segala-galanya, tidak ada kepemilikan individu serta negara dan masyarakat dunia dalam satu pemerintahan terpusat; Ketiga, Komunisme-Trotsky, dikenal sebagai Komunis-Putih, Trotsky lebih menjunjung kebebasan revolusi tiap negara di dunia tanpa mengikuti Uni-Soviet, hal ini disebabkan karakteristik tiap-tiap negara berbeda-beda satu sama lain, misalnya rakyat Asia yang kehidupannya berhubungan-erat dengan corak agraris (pertanian) seperti Indonesia, Filipina, Tiongkok, Indo-China, Burma, Malaya, India. Hal ini tentu saja berbeda dengan kehidupan masyarakat di Eropa yang kehidupannya sudah bercorak industri, terutama Inggris, Jerman, Perancis, Rusia.

Khusus komunis pada perkembangannya mengalami beberapa aliran pemikiran, hal ini terutama dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada dari masa ke masa, seperti pada tahun 1935, Sekretariat Jenderal Partai Komunis merumuskan aliran pemikiran Georgi Dimitrov, yaitu suatu pemikiran yang menekankan kerjasama antara komunis dengan kaum kapitalis-liberal dalam menghadapi ancaman Nazisme dan Fasisme dari Jerman, Italia, Jepang serta Spanyol menjelang Perang Dunia II. Kerjasama ini bersifat semu, dimana hanya terjadi karena kedua ideologi itu memiliki musuh bersama. Kemudian pada tahun 1947 pasca Perang Dunia II, aliran partai komunis berubah mengikuti aliran Zhdanov, aliran pemikiran ini menyatakan bahwa komunis harus menjaga jarak dengan kaum kapitalis-liberal, hal ini dikarenakan musuh bersama

mereka telah dikalahkan yaitu Nazisme-Fasisme, sehingga menyebabkan dunia terkotak-kotak dalam dua blok yaitu blok barat dan blok timur.

Berdasarkan kedua aliran pemikiran komunis yaitu Dmitrov dan Zhdanov, penulis menganalisis bahwa kedua pemikiran itu masing-masing memiliki pengaruh terhadap Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, diantaranya Pertama, aliran Dmitrov yang menekankan kerjasama dengan kaum kapitalis-liberal menyebabkan hubungan renggang antara tokoh Tan Malaka, selain faktor kuatnya jiwa nasionalisme Tan Malaka dan pandangan Komintern terhadap Pan-Islamisme, hal ini dikarenakan Komintern bersikap lunak terhadap kapitalis-liberalis yang dianggap sebagai induk dari kolonialisme, perlu diingat bahwa saat itu rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan dan kemiskinan, karena ditindas kaum borjuis dan kapitalisme. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Tan Malaka lebih mementingkan jiwa kebangsaan rakyat dan negaranya dibandingkan garis kebijakan Komintern. Inilah kemudian yang menjadi salah satu alasan pembangkangan Tan Malaka terhadap Komintern. Tetapi untuk urusan menentang fasis, aliran ini memiliki kesamaan pandangan dengan Tan Malaka maupun Sutan Sjahrir, yaitu bersikap non-kooperatif terhadap Jepang.

Selain terhadap Tan Malaka, aliran Dmitrov ini berpengaruh terhadap Sutan Sjahrir terutama dalam urusan diplomasi, dimana golongan sosialis memberikan dukungan pada Sjahrir dalam berhubungan diplomasi dengan Belanda, kecuali kelompok Tan Malaka dan Tentara Nasional Indonesia. Bahkan tampilnya Sutan Sjahrir ke panggung politik sebagai perdana menteri RI juga dikarenakan pengaruh pemikiran Dmitrov yang menjalin hubungan dengan kaum kapitalis-liberal, sehingga kedudukan

Sjahrir sebagai perdana menteri RI tidak mendapatkan tantangan baik dari Komintern maupun negara-negara kapitalis-liberal.

Keadaan perpolitikan berubah total saat tampilnya tokoh Andrei Alexandrovich Zhdanov, beliau berpandangan sudah seharusnya kaum komunis menjaga jarak dengan kaum kapitalis-liberal, yang berimbas pada perang dingin antara dua kelompok negara. Perubahan haluan ini dideklarasikan oleh Communist Information Bureau (Cominform) pada September 1947. Tentu perubahan arus kebijakan juga berpengaruh di Indonesia dengan adanya Peristiwa Madiun 1948 yang dipimpin Musso dan Amir Syarifudin yang membawa garis politik Zhdanov. Peristiwa Madiun 1948 merupakan dampak pertentangan antara kelompok komunis dengan borjuis dan sosial-demokrat.

4.1.2. Pemikiran-Pemikiran Sutan Sjahrir

Awal abad ke 20 adalah awal pergerakan nasional di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tumbuhnya pergerakan nasional di Indonesia, diantaranya :

A. Faktor Eksternal, yaitu :

- 1) Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, kemenangan ini memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Asia bahwa bangsa Barat bisa dikalahkan.
- 2) Munculnya gerakan Pan-Islamisme di Timur-Tengah, gerakan Nasionalisme di Tiongkok, Filipina dan India.
- 3) Masuknya paham-paham baru di Indonesia, seperti Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme dan Komunisme.

B. Faktor Internal, yaitu

Munculnya golongan terpelajar, yang timbul karena perkembangan pendidikan di tanah-air yaitu berdirinya sekolah maupun perguruan tinggi. Ini dikarenakan adanya

Politik Etis (balas budi), dalam bidang pendidikan sehingga memberikan kesempatan pada anak-anak pribumi untuk mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Politik Etis dimulai sejak akhir abad ke 19, yang kemudian dampaknya dirasakan pada awal abad ke 20 yaitu masa pergerakan nasional.

Masa pergerakan nasional ditandai dengan munculnya organisasi politik modern, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Fenomena ini menjadi akibat berdirinya tingkat pendidikan mulai dasar sampai perguruan tinggi di kota-kota besar yang memberikan kesempatan kepada pemuda pribumi dalam memperoleh ilmu pengetahuan baru, hal ini kemudian melahirkan tokoh maupun organisasi pergerakan nasional. Tidak terkecuali juga Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang berkesempatan mengikuti pendidikan mulai dasar sampai menengah.

Sutan Sjahrir mendapatkan pendidikan mulai dari sekolah ELS, MULO sampai masuk AMS di Bandung tahun 1926. Menurut Des Alwi, nasionalisme dalam diri Sutan Sjahrir tumbuh pertama kali, tatkala mendengar pidato Dr Cipto Mangunkusumo di alun-alun Bandung. Sejak bersekolah di AMS (SMA), aktif dalam kegiatan sepakbola di klub Voetbalvereniging Poengkoer dan Luno serta kelompok sandiwara Batovis, kelompok sandiwara yang ceritanya banyak mengkritik pemerintah dan mengeluarkan ide kebangsaan atau kemerdekaan. Selain itu ia sempat aktif mendirikan Tjahja Volksuniversitet atau Tjahja Sekolah Rakyat, yang memberikan pendidikan gratis pada rakyat jelata dan kelompok studi Patriae Scientiaequae, ajang diskusi politik yaitu debat mengenai ide kebangsaan dan kemerdekaan bangsa (Tempo, 2008 : 21).

Setamat sekolah AMS, Sjahrir kemudian melanjutkan sekolah di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di Belanda, beliau berkenalan dan mendalami ideologi

sosialisme dan berteman dengan Salomon Tas, Ketua Klub Sosial-Demokrat dan isterinya Maria Duchateau (kelak dinikahi oleh Sjahrir, meski sebentar). Sjahrir sangat senang berdiskusi mengenai pemikiran tokoh sosialis. Selain aktif di klub, beliau juga bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional sehingga bisa mendapat uang saku dan mengenal kehidupan kaum buruh secara langsung. Kehidupan bebas di Belanda membuat hatinya puas, dimana tidak ada garis pemisah antara warga negeri penjajah dengan penduduk wilayah jajahan. Cita-cita inilah yang ingin diperjuangkannya ketika pulang ke Indonesia. Pertemanannya dengan kaum sosialis dan pengalaman hidup di Belanda membentuk seorang Sutan sjahrir yang anti imperialisme, kapitalisme dan fasisme. Baginya sikap imperialisme, kapitalisme maupun fasisme merupakan sikap yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, sebab merugikan dan menindas golongan lain yaitu golongan kecil, petani, buruh dan minoritas (Tempo, 2009 :26).

Saat di Belanda, Sjahrir serius mempelajari Marxisme. Dia mengamati dan menyadari bahwa ajaran Marx tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Eropa. Kaum buruh tidak berperan sebagai kelas revolusioner dan tidak mengalami proses pemiskinan. Kapitalisme tidak runtuh sebagaimana diramalkan Karl Marx. Kapitalisme mampu merangkul kaum buruh. Maka perjuangan kelas yang merupakan sendi ajaran Marx tidak lagi relevan, sosialisme tidak perlu dicapai melalui revolusi, tapi bisa dengan demokratis. Sjahrir juga dipengaruhi oleh aliran revisionisme yang mengkritik Marxisme, sehingga ia tidak anti kapitalisme tapi juga tidak bersimpati pada ekonomi sistem komando yang dilaksanakan di Uni Soviet. Beliau sangat terbuka bagi bekerjanya kekuatan pasar ekonomi dan usaha swasta (Anwar, 2002 : 102).

Pengalaman dan keaktifan berpolitiknya menyebabkan Sutan Sjahrir bertemu dengan Mohammad Hatta dan masuk Perhimpunan Indonesia. Kesibukannya berorganisasi membuat kuliahnya terbengkalai sehingga Hatta mendorongnya pulang ke tanah air. Penghujung tahun 1931 Sjahrir meninggalkan kampus dan pulang ke tanah air dan kemudian bergabung dengan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) Pendidikan. Saat Hatta pulang ke tanah air, organisasi ini bertambah radikal dalam melawan pemerintah sehingga tokoh-tokoh pergerakan banyak diasingkan ke Boven-Digol, termasuk Sjahrir sendiri (Anwar, 2010 : 74). Sjahrir dan Hatta percaya bahwa pembentukan kader-kader terpilih yang berpendidikan lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan kepemimpinan yang bergantung pada seorang figur pimpinan. Pola pikir seperti ini merupakan pola organisasi dan cara kerja organisasi politik di Eropa, terutama Partai Sosialis Belanda. Tindakan keduanya didorong oleh pandangan bahwa partai-partai massa seperti Partindo, tidak sesuai dalam membangun nasionalisme, hal itu disebabkan mudah dilumpuhkannya organisasi dengan cara memenjarakan pemimpin kharismaniknya. Bagi mereka membangun kekuatan nasionalis, kekuatan pimpinan juga harus diperluas sampai kelompok yang lebih besar, dan setiap kelompok saling melibatkan diri untuk mencapai lapisan kekuatan baru dan memungkinkan kegiatan partai berlanjut apabila pemimpin-pemimpin utamanya ditangkap (Tempo, 2008 : 36-37).

Pada saat Indonesia diduduki Jepang dari tahun 1942-1945, Sutan Sjahrir dan Moh Hatta berada dalam jalur yang berbeda, Sutan Sjahrir tetap bersikap non-kooperatif terhadap Jepang sedangkan Moh Hatta bersama Soekarno memilih bekerjasama dan ikut aktif dalam berbagai organisasi bentukan Jepang, seperti Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dan Jawa Hokokai. Saat pembacaan Proklamasi kemerdekaan pada tanggal

17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir tidak hadir dalam proses tersebut, sebab Sjahrir berpandangan bahwa proklamasi Indonesia tidak murni, banyak intervensi pihak Jepang terutama Laksamana Tadashi Maeda dan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah Jepang serta Soekarno maupun Hatta merupakan antek-antek Jepang. Pendukung Sjahrir menyerukan agar dibacakan proklamasi kemerdekaan tanpa Soekarno-Hatta tapi Sjahrir menolak sebab khawatir timbul perpecahan antar pemuda dan masyarakat (Tempo, 2008 : 34-35).

Sutan Sjahrir berpendirian bahwa politik adalah suatu etika yang menuntut agar tujuan yang dipilih harus sesuai dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat di tes dengan kriteria moral. Menurut tafsiran Dr Ignas Kleden, tafsiran politik Sjahrir memiliki kesamaan dengan kutipan dari Friedrich Schiller, jika kita padukan antara keduanya, maka politik bagi Sjahrir adalah *das Leben einsetzen und dandurch das Leben gewinnen*, memiliki makna politik adalah mempertaruhkan hidup dan dengan itu memenangkan hidup itu sendiri.

Mempertaruhkan hidup adalah suatu sikap perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang serba nekat. Tetapi, Sjahrir memperingatkan bahwa dalam politik hidup dipertaruhkan untuk dimenangkan, bukan untuk disia-siakan atau dihilangkan dengan cara yang gampang. Pada titik inilah, dapat kita pahami keemasannya tentang orang-orang muda di Indonesia pada masa selepas Perang Dunia II dan pada awal kemerdekaan, yang penuh tenaga dan determinasi, tetapi ketiadaan pegangan tentang bagaimana hidup mereka harus dimenangkan. Setelah Jepang menyerah kalah, Sjahrir mencatat dengan prihatin bahwa para pemuda terjebak diantara sikap nekat disatu pihak dan keragu-raguan dipihak lainnya. Semboyan “Merdeka atau Mati ”ternyata dapat

menjadi perangkap kejiwaan. Karena, selagi menyaksikan kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud sedangkan kesempatan mati belum juga tiba, maka para pemuda terombang-ambing dalam kebimbangan yang tidak menentu. Ini semua terjadi karena, menurut Sjahrir, selama Jepang berkuasa di Indonesia, para pemuda kita hanya dilatih untuk berbaris dan berkelahi, tetapi tak pernah dilatih untuk memimpin (Sjahrir : 37).

Sutan Sjahrir sangat mendambakan kebebasan untuk setiap orang, yaitu individu-individu yang dapat menggunakan akal pikirannya untuk bertanggung jawab terhadap cita-cita dan tindak perbuatannya masing-masing. Impian itu mempunyai beberapa hambatan dan tantangan dalam negeri. Sjahrir sangat cemas melihat kondisi dalam negeri, dimana ada indikasi kembali tumbuhnya feodalisme lama dalam politik Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahwa kemerdekaan nasional memberi kesempatan kepada pemimpin nasional untuk menjadi raja-raja versi baru yang tetap membelenggu rakyatnya dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Karena itu, selain revolusi nasional dibutuhkan juga revolusi sosial yang dinamakan Revolusi Kerakyatan (Sjahrir : 44). Revolusi Kerakyatan ini bertujuan membebaskan dan memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan manusia, yaitu bebas dari penindasan serta penghinaan oleh manusia terhadap manusia (Sjahrir, 1982 : 84).

Revolusi Nasional harus didahulukan, sebab hanya dalam alam kemerdekaan perjuangan menentang feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kapitalisme dapat dilaksanakan. Menurut Sjahrir, Kolonialisme Belanda telah mengawinkan rasio modern dari Barat dengan feodalisme lokal dengan sangat cerdas, dan hasilnya adalah sebuah fasisme terselubung, yang menyiapkan lahan subur untuk fasisme Jepang. Kemudian partai politik sebaiknya berbentuk partai kader bukan

partai massa, karena dengan partai kader, anggota mempunyai pengetahuan dan keyakinan politik untuk memikul tanggung jawab politik, sedangkan partai massa keputusan politik diserahkan ketangan pemimpin politik, dan massa rakyat memiliki ketergantungan dan tinggal dimobilisasi menurut kehendak pemimpin politik. Bersama Bung Hatta, dia mendorong sistem multipartai agar politik terhindar dari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada diri satu orang atau satu golongan.

Secara Internasional, Sjahrir cemas melihat situasi dunia yaitu menguatnya fasisme di Spanyol, Italia, Jerman hingga Jepang. Dalam pandangannya, feodalisme lokal sangat mudah digabungkan dengan paham totaliter, karena massa rakyat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keyakinan politik akan mudah dimobilisasi melalui slogan dan propaganda. Baik Totalitarianisme maupun feodalisme mempunyai kesamaan watak dalam membunuh kebebasan perorangan, yang pada akhirnya manusia tidak lebih dari budak nafsu. Selain kecemasannya terhadap totalitarianisme kanan, yaitu fasisme, beliau juga memiliki kekhawatiran besar terhadap totalitarianisme kiri, yaitu Komunisme. Dalam politik internasional keyakinan ini direalisasikan dengan menolak berpihak pada kedua yaitu Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. Pembentukan Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada bulan April 1947 merupakan suatu politik luar negeri bebas aktif tanpa membangun persekutuan dengan salah satu blok yang sedang bersaing (Anwar, 2011 : XVII).

Sjahrir berpandangan bahwa revolusi nasional harus segera didukung oleh revolusi sosial yang dapat membebaskan rakyat dari cengkeraman feodalisme lama dan fasisme serta kapitalisme yang tak terkendali. Kemerdekaan nasional bukanlah tujuan

akhir dari perjuangan politik, tetapi menjadi jalan bagi rakyat untuk mengeluarkan bakat diri dalam sebuah kebebasan tanpa halangan dan hambatan. Karena itulah, nasionalisme harus tunduk kepada kepentingan demokrasi, dan bukan sebaliknya, karena tanpa demokrasi maka nasionalisme dapat bersekutu kembali dengan feodalisme lama (*Sutan Sjahrir* : 46). Kalau dalam negeri nasionalisme harus tunduk pada tuntutan demokrasi, maka dalam hubungan internasional, nasionalisme harus tunduk pada tuntutan humanisme, karena kalau tidak, maka nasionalisme itu dapat menjadi sumber ketegangan dan perseteruan diantara bangsa satu dengan bangsa lainnya.

Politik bagi Sjahrir adalah usaha dan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai martabat dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi nilai-nilai tersebut tidak mungkin terwujud hanya dengan menghilangkan feodalisme dan menolak setiap politik yang totaliter. Hal yang harus kita lakukan adalah edukasi, yaitu pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Di tempat pembuangannya di Banda Neira, teman-teman akrabnya adalah anak-anak kecil yang hampir setiap hari bermain dirumahnya. Mereka menjadi murid-murid privat, dimana mereka diajar membaca, menulis, berbahasa dengan benar dan berani bertanya, dengan cara itu membuka pintu bagi mereka ke dunia ilmu pengetahuan. Kembali dari pembuangannya, Sjahrir aktif lagi dalam pergerakan dan memberi perhatian khusus kepada para pemuda. Dengan kesibukannya, beliau tetap memberi perhatian besar kepada perkembangan dunia ilmu pengetahuan, melakukan studi-studi sosial, menulis pandangan tentang manfaat nuklir, mengikuti berita seni dan sastra, memberikan komentar tentang pemikiran-pemikiran filsafat pada masanya.

Dalam kaitan dengan edukasi, berarti politik merupakan suatu usaha mendidik suatu bangsa dan rakyatnya agar mandiri dan bebas. Kemandirian adalah lawan dari

ketidakmatangan dan kebebasan adalah lawan dari ketergantungan. Karena itulah, dia selalu menekankan pentingnya dimensi dalam dari kebudayaan, politik dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, banyak kaum terpelajar pada waktu itu baru menjadi pemegang titel dan belum menjadi kaum intelektual. Mereka masih memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bersifat lahiriah semata, dan sebagai barang mati dan “bukan sebagai hakikat hidup yang senantiasa harus dipupuk dan dipelihara” (Sjahrir, 1990 : 5). Demikian pun tentang kebudayaan dan politik Sjahrir menulis :

Inilah inti persoalan : kita akhirnya adalah anak-anak zaman kita, dan kita mempunyai hati nurani. Sebutlah itu respek terhadap diri sendiri, sebutlah itu kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, sebutlah itu dengan nama apa saja-hati nurani itu berarti menguji diri sendiri pada pegangan batin kita, pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, prasangka-prasangka, perasaan-perasaan dan naluri-naluri. Kita semua dalam diri kita mempunyai sedikit dari imperatif kategoris seperti yang dimaksud oleh Kant “ (Sjahrir, 1990 : 30). Menurut Immanuel Kant, dalam politik tidak berlaku Imperatif Kategoris, tetapi Imperatif Hipotesis, yakni suatu perintah bersyarat, dan disini syaratnya adalah akibat atau hasil yang bakal diberikan oleh pelaksanaan perintah tersebut. Pokok pertimbangan adalah apakah dengan melakukan sesuatu perintah seseorang akan memperoleh akibat yang dibayangkannya. Kalau seorang politikus Indonesia memperjuangkan nasib para petani dan nelayan dengan perhitungan bahwa dia akan memperoleh dukungan yang cukup dalam pemilu, maka politikus ini bertindak berdasarkan Imperatif Hipotesis. Tindakan nya ini baik dan perlu, tapi tidak bisa dijadikan prinsip umum bagi tindakan orang-orang lain yang kebetulan tidak mempunyai minat untuk posisi politik.

Namun, kadang ada orang yang berjuang mati-matian untuk kelompok petani dan nelayan, meskipun tidak ada target politik padanya, semata-mata karena merasa bahwa kelompok ini layak dibela karena mereka juga mempunyai martabat dan hak-hak seperti orang-orang dari kelompok lain yang lebih beruntung. Di sini kita berjumpa orang yang bertindak berdasarkan Imperatif Kategoris, karena sikap dan tindakan mereka merupakan bentuk dari prinsip tindakan semua orang, dan bahkan dapat dijadikan prinsip dalam pembuatan undang-undang. Tidaklah mengherankan Sjahrir menulis : “ Hal meletakkan suatu dasar moral bagi politik dan kebudayaan lalu dianggap sebagai politik dalam pengertian yang lebih luas “ (Sjahrir, 1990 : 18).

Demikianlah isi pokok pemikiran Sutan Sjahrir, suatu pokok pemikiran yang memperjuangkan nasib rakyat kecil tertindas dengan paham sosialisme kerakyatan, yang bertujuan membebaskan dan memperjuangkan kemerdekaan manusia, dengan cara melakukan revolusi nasional yaitu memerdekakan bangsa dari penjajahan dan revolusi nasional, yaitu membebaskan masyarakat dari penindasan kapitalisme dan feodalisme lama. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan hak mendapatkan edukasi (pendidikan) dan ilmu-pengetahuan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabatnya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil deskripsi mengenai pemikiran Sutan Sjahrir, penulis menilai bahwa pola pemikiran politik Sjahrir lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran aliran sosialisme Robert Owen dan Marie Charle Fourir, yang menekankan pada kebebasan berpolitik masyarakat dalam pemilihan umum, pendidikan bagi semua kalangan masyarakat serta perbaikan ekonomi bagi golongan buruh. Hal ini tercermin dari kebijakan Sutan Sjahrir yang mendukung terselenggaranya parlemen dengan sistem

multi-partai, menyerukan pendidikan sebagai wadah mendidik rakyat agar menjadi orang yang bebas dan merdeka di Indonesia. Dapat kita katakan bahwa Sutan Sjahrir tidak setuju akan perebutan kekuasaan politik secara revolusi, melainkan perubahan harus terjadi secara perlahan dengan banyak memberikan kesempatan kepada rakyat pendidikan dan kebebasan berpolitik. Apalagi ini didukung oleh pengalaman Sjahrir yang melihat kaum kapitalis mampu berdampingan dengan kaum buruh di Eropa terutama Belanda, sehingga ajaran Karl Marx yang menekankan perjuangan kelas dan perebutan kekuatan secara revolusi dipandang tidak lagi relevan, karena untuk mencapai sosialisme tidak hanya dilakukan dengan revolusi tapi bisa dengan sistem demokrasi.

4.1.3 Pemikiran-Pemikiran Tan Malaka

Tan Malaka lahir di Suliki, Sumatra Barat tahun 1913. Tan Malaka adalah salah satu tokoh nasional yang berasal dari Minangkabau atau Sumatra Barat selain Sutan Sjahrir. Tan Malaka memperoleh kesempatan bersekolah mulai dari tingkatan bawah sampai tingkatan tinggi. Sekolah tinggi yang pernah dicicipinya adalah Kweekschool di Bukittinggi. Dari sekolah ini, Tan Malaka berkenalan dengan Tuan Horensma, guru sekaligus menjabat Direktur II di Kweekschool. Keduanya juga sama-sama aktif pada perkumpulan orkes musik Kweekschool. Pengalaman dan prestasi belajar Tan Malaka di sekolah, kemudian memberikan kesempatan luas baginya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu belajar di Rijksweekschool di Haarlem, Belanda. Sekolah ini mencetak calon guru, lulusan Rijksweekschool diharapkan menjadi guru termasuk Tan Malaka. Tan Malaka datang ke Belanda tahun 1913 untuk menuntut ilmu.

Sebetulnya awal kedatangannya di Belanda, Tan Malaka sangat mengagumi kemajuan negara Amerika Serikat dan Jerman tetapi keberhasilan Revolusi Bolsevik di Rusia pada

tahun 1917 mendorongnya semakin dekat ke pemikiran kiri atau Sosialisme-Komunisme.

Tan Malaka tinggal dalam rumah sewaan seorang keluarga buruh, sebuah rumah kecil di jalan kecil bernama Jacobijnenstraat, sebuah kamar loteng yang sempit gelap. Pemilik rumah adalah nyonya yang pekerjaan sehari-harinya menjadi buruh perempuan jujur, sederhana, penuh rasa kemanusiaan, disaat masa kemanusiaan dunia tidak berpihak kepada dirinya. Bersuamikan seorang laki-laki bernama Van der Mij, seorang yang mengidap sakit paru-paru dan bekerja sebagai buruh besi di salah satu bengkel di Haarlem. Saat tidak bekerja, mereka tidak akan menerima gaji, pensiunan ataupun bantuan dari majikannya. Nyonya dan Tuan Van der Mij hidup dengan menyewakan kamar kepada kami dan mendapatkan sedikit bantuan dari anaknya yang bekerja sebagai juru tulis rendahan di salah satu kantor kota Amsterdam. Kiriman setiap bulan dari anaknya, digunakan untuk membayar pengobatan rumah sakit tuan Van der Mij (Malaka, 2008 : 43).

Kota Bussum merupakan tempat pesinggahan Tan Malaka setelah Haarlem, disana kediamannya setengah mewah dan merupakan tempat tinggal kaum borjuis atau pengusaha. Pengalaman sebelumnya di Haarlem, cukup memberikan gambaran luas akan perbandingan antara kaum borjuis dan buruh (proletar). Ketika meletus revolusi Bolshevik di Rusia, di berada di Bussum. Revolusi memberikan keyakinan pada golongan masyarakat akan peralihan zaman ke arah sosialisme. Disana, Tan Malaka memulihkan kesehatannya. Sebetulnya Ny. Van der Mij mengajaknya kembali ke Haarlem, apabila dia sembuh. Tapi Tan Malaka berpikiran lain, ia mempunyai tujuan

dan harapan lain, diantaranya ingin mendidik anak-anak Indonesia, sehingga akan kembali ke Indonesia.

Tahun 1919, Tan Malaka datang ke Indonesia, beliau menjadi guru di daerah Deli, sebuah daerah yang kaya akan hasil tambang dan perkebunan tembakau dan terletak di utara Sumatra. Saat menjadi guru, Tan Malaka melihat kesenjangan sosial antara pemilik tanah dan modal yang kaya dengan buruh serta petani miskin. Pengaruh pemikiran Revolusi Bolshevik yang meresap dalam dirinya ketika belajar di Negeri Belanda memunculkan ide revolusi sebagai solusi menyelamatkan rakyat dari cengkeraman kaum kapitalis dan penjajah. Beliau kemudian meninggalkan pekerjaannya di Deli, berlayar ke Pulau Jawa dan kemudian berangkat dan menetap di Semarang tahun 1921. Berkenalan dengan Semaun, membawanya kedalam pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI), sampai mendapat kepercayaan untuk menjalankan sekolah yang diselenggarakan PKI. Karena berhasil mengelola sekolah, beliau mendapat kehormatan yaitu namanya diabadikan menjadi “ Sekolah Tan Malaka “ (Alfian, 1978 : 145).

Selain mengelola sekolah Tan Malaka terlibat aktif dalam menulis dan pemogokan, sehingga membuatnya ditangkap pemerintah dan mengalami pembuangan keluar negeri. Penangkapan dan pembuangan membuat namanya dikenal luas. Partai Komunis Belanda kemudian menjadikannya sebagai calon nomor tiga parlemen, walaupun mendapat suara terbanyak kedua, beliau gagal menduduki kursi parlemen Belanda karena Partai Komunis Belanda hanya mendapat dua buah kursi dan Tan Malaka dianggap belum cukup umur. Selain mengembara di Negeri Belanda, Tan Malaka juga berpetualang ke Jerman dan Rusia. Bahkan saat berlangsung Kongres Komintern (Komunisme Internasional), Tan Malaka mengeluarkan pendapat pentingnya Komunisme

Internasional dalam menjalin hubungan dengan Pan Islamisme, sebab keduanya memiliki paham yang sama yaitu anti-imperialisme. Apalagi Islam merupakan kekuatan massa besar di Indonesia melalui organisasi Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi yang berpengaruh dengan pengikut besar dan fanatik. Tapi ide dan pendapatnya tidak diterima oleh Kongres Komintern. Selain berkelana di Eropa mengikuti pemilihan parlemen dan Kongres Komintern, tahun 1925 Tan Malaka mengeluarkan sebuah buku berjudul “ Menuju Republik Indonesia”, yang pertama kali terbit di Kowloon, Hongkong. Saat itu beliau menjadi agen Komintern di China (Alfian, 1978 : 147).

Tan Malaka merupakan tokoh yang berani berbeda sikap dan pandangan dengan Komintern dan PKI. Dia dituduh sebagai pengikut Trotsky, tokoh komunis yang dibenci karena dianggap melenceng dari kebijakan Komintern. Saat pimpinan PKI mempersiapkan pemberontakan tahun 1926, Tan Malaka mencegah dan menganggap PKI belum siap melakukan revolusi serta belum mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tapi pemberontakan tahun 1926 tidak dapat dicegah dan meluas ke Sumatra Barat dan Banten. Walaupun begitu pemerintah kolonial dengan cepat mampu melumpuhkan pemberontakan itu, banyak tokoh PKI yang ditangkap. Tan Malaka yang tidak ikut terlibat juga dikejar-kejar oleh pemerintah sehingga beliau melarikan diri ke luar negeri, yakni ke Bangkok, Thailand. Pada tahun 1927 mereka mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI). Inisiatif mendirikan PARI merupakan dampak dari perselisihannya dengan PKI dan ketidaksesuaiannya dengan sikap politik Komintern. Kalau analisa diatas benar berarti warna nasionalisme Tan Malaka lebih kental dibandingkan fanatisme terhadap ideologi Komunis Internasional. Pada suatu kesempatan, beliau menegaskan

sebagai mantan Ketua Sarekat Rakyat bukan PKI dan menyangkal sebagai agen Komintern (Alfian, 1978 : 154).

Keaktifannya dalam Partai Republik Indonesia (PARI), membuat Tan Malaka beberapa kali berkeliling Asia untuk menghindari penangkapan-penangkapan, mulai dari Manila (Filipina), Rangon (Birma), dan beberapa kota China yaitu Shanghai, Amoy dan Hongkong. Sempat mendirikan Sekolah Bahasa Asing di Amoy, China sampai tahun 1937, ketika dia lari dari sewaktu tentara Jepang menyerbu ke kota itu. Dia menyingkir ke Singapura dan menyamar sebagai guru sampai tahun 1942. Tahun 1942, Tan Malaka kembali ke tanah air dan bekerja sebagai juru tulis pada pertambangan di Bayah, Banten dengan nama samaran Ilyas Husein. Kehidupan sengsara para rommusha di Bayah, membuat hasrat revolusinya kembali bergejolak. Sikap ini kemudian memunculkan rasa kebencian terhadap Jepang (Malaka, 2008 : 386).

Bulan Juni 1945, Tan Malaka mendapat undangan dari Ketua Cabang Badan Pembantu Prajurit (BPP) Peta Rangkasbitung. Pertemuan itu memutuskan Tan Malaka (dengan nama samaran Ilyas Husein) menjadi wakil Banten untuk mengikuti Konferensi Pemuda di Jakarta, tapi gagal berlangsung karena dibatalkan oleh Jepang. Saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Tan Malaka tidak ikut terlibat langsung mempersiapkan proklamasi tersebut. Tetapi pemikirannya mengenai kemerdekaan banyak dikenal oleh tokoh-tokoh nasional melalui tulisan-tulisannya, salah satunya Buku *Menuju Republik Indonesia* diterbitkan tahun 1925 (Malaka, 2008 : 549).

Tan Malaka beranggapan revolusi Indonesia harus dijalankan dengan “Aksi Massa”, yang tersusun rapi dan terorganisir baik. Aksi massa umumnya bergerak dengan strategi “pemogokan dan pemboikotan”. Bila buruh yang berjuta-juta meletakkan

pekerjaannya dengan maksud tertentu, memaksa meminta keuntungan ekonomi dan politik, niscaya kerugian dan kekacauan ekonomi yang ditandai oleh aksi mereka dapat melemahkan kaum penjajah. Boikot massa terutama di pulau Jawa yang hebat dan keras, sangat dibenci oleh imperialisme Belanda. Demonstrasi politik yang ditunjukkan dengan massa yang berbaris di jalan raya dan di gedung parlemen akan menunjukkan kepada musuh betapa besarnya kekuatan kita. Bila slogan dan tuntutan sungguh diikuti oleh massa, demonstrasi politik dapat jadi gelombang hebat, yang makin lama semakin deras dan kuat dalam meruntuhkan benteng-benteng ekonomi dan politik kelas yang berkuasa. Kekuatan aksi massa bagi Tan Malaka harus disatukan dalam satu wadah perjuangan atau partai politik, supaya semua golongan masyarakat dan kelompok bisa bersatu dan tidak terpecah-pecah (Malaka, 2000 : 82).

Pertentangan sosial antara kelas kapitalis dan buruh di Indonesia lebih tajam dari apa yang kelihatan oleh mata. Keuntungan besar dari gula, minyak, kopi, karet, the dan lain-lain sebagian besar mengalir ke Eropa, ke kantong bangsa Belanda, dan sebagian kecil ada juga yang kembali ke Indonesia, tetapi bukan menjadi suplai untuk menaikkan gaji buruh, melainkan sebagai penambah modal yang sudah ada, buat membayar cuti dan pension pegawai pegawai Belanda. Kemalangan yang menimpa buruh Indonesia dapat diperbaiki dengan jalan menaikkan gaji mereka supaya cukup untuk membeli keperluan sehari-hari. Banyaknya pembukaan perkebunan karet menyebabkan beberapa kaum buruh atau penganggur mendapatkan pekerjaan, tetapi sebaliknya tanah mereka disewakan dan dijual sehingga banyak petani yang kehilangan miliknya. Tambahan lagi, kuatnya ekspansi modal mengakibatkan bertambah naiknya barang keperluan sehari-hari. (Malaka, 2000 : 59).

Febby Syahputra, 2011

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dalam brosur *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia) tahun 1925, Tan Malaka menegaskan bahwa eks Hindia-Belanda harus menjadi Republik Indonesia. Namun Republik dalam gagasan Tan Malaka tidak menganut Trias Politika Montesqueiu. Bagi Tan Malaka, pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif hanya menghasilkan kerusakan. Pemisahan antara orang yang membuat undang-undang dan menjalankan aturan menimbulkan kesenjangan antara aturan dan realitas. Pelaksanaan dilapangan (eksekutif) adalah pihak yang langsung berhadapan dengan persoalan sesungguhnya. Eksekutif selalu dibuat repot menjalankan tugas ketika aturan dibuat oleh orang-orang yang hanya melihat persoalan dari jauh (parlemen).

Demokrasi dengan sistem parlemen melakukan ritual pemilihan sekali dalam 4, 5 atau 6 tahun. Dalam kurun waktu demikian lama, mereka menjelma menjadi kelompok sendiri yang sudah berpisah dari masyarakat. Sedangkan kebutuhan dan pikiran rakyat berubah-ubah. Karena para anggota parlemen itu tidak dekat dengan rakyat, seharusnya mereka tak berhak lagi disebut sebagai wakil rakyat. Konsekuensinya adalah parlemen memiliki kemungkinan besar menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan golongan yang memiliki modal, jauh dari kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Parlemen dengan sendirinya akan tergoda untuk berselingkuh dengan eksekutif, perusahaan dan perbankan. Pada intinya Tan Malaka memandang bahwa parlemen tidak boleh ada dalam negara Republik Indonesia yang diimpikannya (Nasbi, 2008 : 72-73).

Pokok pikiran penting Tan Malaka lainnya dituangkan melalui tulisannya berjudul *Madilog* (Materialisme, Dialektika dan Logika), buku yang selesai ditulis oleh

Tan Malaka pada tahun 1943. Inspirasi penulisan buku ini didapatkan dari paham Marxisme tapi disesuaikan oleh Tan Malaka menurut kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia. Saat itu rakyat Indonesia banyak dipengaruhi hal-hal yang berbau tahayul, mistik, gaib. Untuk mencapai kemajuan dan kemerdekaan, menurut Tan Malaka cara pandang seperti itu harus dihilangkan. Madilog merupakan istilah baru cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan unsur kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.

Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Tan Malaka mengatakan, bahwa Madilog sama sekali dan tepat berlawanan dengan “ketimuran” yang digembar-gemborkan lebih dari semestinya, semenjak Indonesia dimasuki tentara Jepang. “Ketimuran” disini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan mistika, kegaiban, dari manapun juga datangnya dari timur. Tidak pula saya maksudkan, bahwa tak ada yang gaib di dunia, yakni sudah semua diketahui. Pengetahuan tidak akan bisa habis dan tidak boleh habis. Dan seterusnya. Demikian juga pengetahuan baru menimbulkan persoalan baru, terus menerus. Tetapi persoalan baru itu

akan terus menerus pula bisa diselesaikan. Tidak ada batas pengetahuan dan tidak pula batas-batasnya persoalan (Malaka, 2010 : 296).

Inilah bagian dari kehidupan manusia dan bagian dari dunia pikiran. Barang siapa yang mengaku, bahwa ada batas pengetahuan atau batas persoalan, maka dia jatuh dalam kelemahan mistika dan terperangkap dogmatisme. Dia akan berpangku tangan, dia tidak lagi mengeluarkan kritik atas pengetahuan yang sudah diperoleh dan tidak akan mencari pengetahuan yang lebih sempurna. Dia mati dengan suatu pengetahuannya, karena pengetahuannya mati pula. Semua barang yang hidup. Tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Yang tetap cuma ketetapan perubahan, atau perubahan ketetapan (Malaka, 2010 : 296).

Berdasarkan hasil pemikiran Tan Malaka, penulis berkesimpulan bahwa kerjasama Tan Malaka dengan Komintern bertujuan memerdekakan bangsanya, beliau menjadikan ideologi dan ajaran Marxime dan Leninisme sebagai alat demi mencapai tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Bahkan walaupun pernah menjadi wakil Komintern untuk kawasan Asia tapi Tan Malaka tidak mau menjadi budak Komintern. Beliau banyak menyumbangkan pikiran kebangsaannya melalui tulisan tulisannya yaitu *Menuju Republik Indonesia, Massa Aksi, Dari Penjara Ke Penjara* serta *Madilog*. Buku-buku inilah yang menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dalam peristiwa PKI 1926 / 1927, Tan Malaka berpandangan dengan tokoh PKI lainnya, hal ini kemungkinan besar dikarenakan belum kuatnya pondasi komunis terutama Komunis Internasional (Komintern) dalam membangun kekuatan politiknya, dimana pasca Revolusi Bolshevik tahun 1917, kaum komunis Rusia masih melakukan konsolidasi diri di dalam negeri sendiri dan belum bisa membantu

kemerdekaan negara-negara lain. Jadi, penulis memandang bahwa peristiwa PKI 1926 / 1927, bisa dikatakan sebagai euforia dan suatu usaha untuk mengulang keberhasilan Revolusi Bolshevik di Rusia.

4.1.4. Latar-Belakang Strategi Perjuangan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka

Dalam Menghadapi Imperialisme

Pada masa pergerakan nasional, banyak pemuda Indonesia mendapat kesempatan meraih pendidikan baik di Hindia-Belanda maupun Belanda, salah satunya adalah Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Saat melakukan studi di luar-negeri, secara langsung, mereka bersentuhan dan mengenal pemikiran-pemikiran maupun ideologi-ideologi yang berkembang di Eropa, seperti sosialisme. Ideologi Sosialisme merupakan suatu paham yang memperjuangkan nasib rakyat kecil baik petani, buruh, serta golongan kecil lain dari penindasan dan ketidakadilan yang diakibatkan ketimpangan politik dan ekonomi yang menjadi dominasi kaum kapitalis atau pemilik modal. Paham sosialisme lebih menitikberatkan pada kepentingan bersama atau masyarakat di bandingkan kepentingan individu atau pemilik modal. Bagi golongan terpelajar saat itu, sosialisme dianggap sebagai senjata perlawanan dalam menghadapi kolonialisme dan kapitalisme. Menurut Teori Imprealisme Lenin, kapitalisme adalah induk dari kolonialisme, kapitalisme dan kolonialisme merupakan dua unsur berkaitan yang cenderung melakukan eksploitasi manusia atas manusia dan akan menghasilkan kemakmuran dan kejayaan untuk para pemilik modal dan penderitaan untuk sebagian besar tenaga kerja. Dengan sendirinya, orang-orang yang menolak kolonialisme, secara otomatis akan menentang kapitalisme (Rosihan Anwar, 2011 : XXVI).

Selama berabad-abad rakyat Indonesia menderita Penderitaan rakyat Indonesia yang diakibatkan oleh penjajahan bangsa lain yaitu Belanda, yang melakukan pengurasan sumber daya alam dan manusia melalui kerja rodi maupun kerja paksa. Rakyat diharuskan menyerahkan hasil panennya, bekerja di perkebunan-perkebunan milik Belanda, membayar berbagai macam pajak yang ditetapkan pemerintah. Rakyat dijadikan sapi perahan untuk mengisi kas keuangan Pemerintah Belanda. Selain menghadapi penindasan dari Belanda, rakyat juga ditindas oleh sistem feodalisme yang mangakar kuat dalam budaya Indonesia. Rakyat menjadi sasaran pemerasan kaum bangsawan dan pejabat daerah yang korup, mengambil keuntungan dari setiap upeti dan hasil bumi yang diserahkan masyarakat.

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka melakukan gerakan bawah tanah menentang Jepang. Hal ini dipicu oleh tindakan Jepang yang kejam terhadap rakyat terutama romusha, banyak orang yang dipekerjakan sebagai romusha jatuh sakit dan meninggal karena tidak mendapatkan makanan, istirahat dan kesehatan yang layak. Dengan semena-mena Jepang mengerahkan romusha untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri serta merampas hasil bumi dan panen rakyat sehingga dimana-mana terjadi kelaparan, kemiskinan dan kesengsaraan.

Pengaruh paham sosialisme ketika melakukan studi negeri Belanda serta kondisi sosial masyarakat Indonesia yang menderita dan sengsara oleh penjajahan Belanda, Jepang dan sistem budaya feodalisme, memberikan sebuah inspirasi bagi Sutan sjahrir dan Tan Malaka untuk membebaskan rakyat dari segala penindasan dan penderitaan. Melalui bekal pendidikan yang didapatkan oleh kedua tokoh ini, maka merekapun

melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan melalui

pemikiran-pemikiran sosialis, partai-politik, pendidikan maupun propaganda. Komitmen perjuangannya diwujudkan dengan bersikap non-kooperatif atau tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial baik kepada Belanda pada masa pergerakan nasional (tahun 1920an-1942) maupun Jepang (tahun 1942-1945). Dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka memiliki kesamaan dalam prinsip perjuangan yaitu tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial baik Belanda ataupun Jepang.

Pasca Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Sutan Sjahrir dan Tan Malaka menduduki posisi yang berbeda, Sjahrir menjabat perdana menteri sedangkan Tan Malaka berada diluar pemerintahan. Keduanya kemudian berbeda pandangan dalam menyingkapi strategi perjuangan pasca kemerdekaan. Mengenai perbedaan pandangan perjuangan pasca kemerdekaan kedua tokoh ini dapat kita lihat dari latar belakang mereka.

Pada saat belajar di luar negeri Sutan Sjahrir dan Tan Malaka terpengaruh oleh paham sosialisme yang memperjuangkan rakyat kecil terutama petani, nelayan, buruh dan lainnya. Walaupun sama-sama menganut paham sosialisme tapi mereka berbeda cara pandang dalam prinsip strategi perjuangan, hal itu dikarenakan Sutan Sjahrir banyak bergaul dengan tokoh sosialisme yang berpendidikan tinggi dan demokratis sehingga sifat perjuangannya adalah menjunjung kebebasan dalam hal ini bebas mendirikan partai-politik (multi-partai) bagi tiap kelompok masyarakat, anti-fasis dan anti-diktator serta menekankan tingkat pendidikan bagi masyarakat khususnya masyarakat politik, sebab bagi Sjahrir, partai-politik tidak harus banyak pengikut tapi yang penting anggotanya berpendidikan tinggi sehingga tidak bergantung sama satu pimpinan atau kultus individu

ketokohan. Ketika di Indonesia, Sjahrir banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh nasional yang lebih moderat, seperti Moh Hatta yang lebih banyak berkonsentrasi pada bidang edukasi melalui PNI-Pendidikan (PNI Baru) (Anwar, 2002 :17). Tambahan pula ketika di Belanda, Sjahrir mempelajari Marxisme secara mendasar. Hasil pengajiannya terhadap sosialisme adalah ajaran Marx tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Eropa. Kapitalisme bisa berjalan beriringan dengan tuntutan kaum buruh. Maka perjuangan kelas dalam mencapai sosialisme bisa melalui cara demokratis.

Sedangkan Tan Malaka terpengaruh dengan semangat Revolusi Bolshevik yang digagas Vladimir Ilych Lenin di Rusia. Semangat ini berkobar melalui revolusi rakyat yang menjatuhkan rezim Tsar Nicholas II melalui perebutan kekuasaan dengan senjata. Revolusi Bolshevik memberikan ide bagi Tan Malaka bahwa revolusi melalui aksi massa sangat efektif dalam menjatuhkan rezim penindas rakyat. Revolusi Bolshevik ini kemudian memunculkan pemerintahan Sosialisme-Komunisme Rusia. Meskipun Revolusi ini sangat mempengaruhi ide politik Tan Malaka tapi nilai nasionalismenya tidak hilang, bahkan ide ini coba dilakukannya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Saat di Indonesia, Tan Malaka banyak bergaul langsung dengan kaum tani dan buruh yang tertindas tuan tanah dan penjajahan, seperti di perkebunan Deli dan pertambangan emas di Bayah, Banten. Setelah bekerja sebagai guru di perkebunan Deli, beliau mengembara ke Pulau Jawa, disana beliau datang ke Semarang. Kedatangan Tan Malaka di Semarang membuka hubungannya dengan tokoh-tokoh revolusioner, yaitu

Semaun dan Darsono, pimpinan PKI. Tentu saja pergaulan Tan Malaka di Semarang

yang saat itu terkenal dengan kota merah semakin menguatkan jiwa revolusionernya dalam menentang penjajahan terutama dalam penggalangan kekuatan massa sebagai upaya perebutan kemerdekaan. Dalam hal ini Tan Malaka pernah berkata, “ Dekatilah golongan pekerja ! masukilah kelasnya ! Dengan kelas ini bersama dengan golongan lain, maka kelas pekerja seolah-olah menjadi kelas, sebagai “teras” yang dikelilingi kayu dan kulit, kalau ia terus maju kemuka buat mencapai kemerdekaan yang sejati dan mendirikan negara yang cocok dengan kemakmuran, sama-rata dan persaudaraan (Malaka, 2010 : 36).

Sutan Sjahrir dan Tan Malaka berbeda pendirian mengenai partai-politik. Sutan Sjahrir menginginkan Indonesia diterapkan sistem multi-partai sehingga rakyat memiliki kebebasan politik yang luas sedangkan Tan Malaka menganggap sistem multi-partai hanya memecah belah masyarakat dalam berbagai golongan maupun kelompok sehingga berakibat perjuangan menjadi lemah dan mudah dipatahkan oleh musuh. Perbedaan pandangan ini diakibatkan pola pikir kedua tokoh yang berlawanan, Sutan Sjahrir beranggapan bahwa pentingnya pembentukan partai-partai politik dan parlemen sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan penanaman pendidikan berpolitik sedangkan Tan Malaka menganggap parlemen akan memunculkan kesenjangan antara aturan dan realitas, ini karena adanya pemisahan antara pembuat undang (parlemen) dan pelaksana undang-undang (eksekutif). Bagi Tan Malaka kondisi demikian, eksekutif akan kerepotan menjalankan tugas ketika aturan dibuat oleh orang-orang yang hanya melihat persoalan dari jauh (parlemen). Karena pendirian inilah Tan Malaka sangat keras menentang Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 1945 tentang pendirian partai-partai, sebab partai-politik pasti bermuara dalam sebuah parlemen.

Ketika Indonesia dibawah pemerintahan Belanda dan Jepang, kedua tokoh baik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka memiliki sikap politik yang sama yaitu tidak mau bekerjasama dengan Belanda dan Jepang tetapi ketika Indonesia merdeka, dua orang tokoh tersebut berbeda sikap dan pandangan politik, hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya musuh bersama diantara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Berbeda dengan pada masa pergerakan nasional dan pendudukan Jepang, kedua tokoh menghadapi musuh yang sama yaitu penjajahan Belanda dan Jepang. Apalagi keduanya pasca kemerdekaan berada diposisi berbeda, seperti Sjahrir menjabat perdana menteri RI sedangkan Tan Malaka berada diluar pemerintahan. Perbedaan kedudukan diantara mereka berdua menyebabkan cara pandang mereka dalam melihat, memahami dan mengkaji setiap persoalan tidak sama atau berbeda. Ini misalnya terlihat dari sikap Sutan Sjahrir yang melihat jalur diplomasi sebagai solusi dalam mempertahankan kemerdekaan sedangkan Tan Malaka menekankan pada kekuatan revolusi massa dengan tujuan merebut kemerdekaan 100 %.

Perbedaan pandangan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka tidak terlepas dari aliran pemikiran komintern yang dimotori oleh Georgi Dmitrov tahun 1935 dan Andrei Alexandrovich Zhdanov tahun 1947. Bagi Sutan Sjahrir garis Dmitrov yang tetap dianut oleh Komintern membuat kedudukan dan kebijakannya sebagai perdana menteri memperoleh dukungan dari kelompok sosialis Indonesia kecuali Tan Malaka. Sedangkan bagi Tan Malaka, garis Dmitrov tidak bisa membela kepentingan negara yang dijajah oleh kolonialisme, sebab garis Dmitrov lebih mendorong supaya Komintern bekerjasama dengan negara kapitalis-liberal. Sedangkan garis Zhdanov memberikan dampak berakhirnya hubungan antara Komintern dan kaum kapitalis-liberal, sehingga

menimbulkan peristiwa Madiun 1948 yaitu pertentangan antara kaum sosialis, komunis dan buruh yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat melawan pemerintah RI berkompromi dengan negara kapitalis-liberal.

4.2.Strategi Perjuangan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945-1948

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, maka secara de facto berdirilah negara Republik Indonesia dengan Presiden Ir Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Walaupun Indonesia sudah resmi berdiri sebagai sebuah negara, tetap saja Indonesia masih mendapatkan ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman luar negeri ini terutama datang dari Belanda yang belum mengakui adanya Republik Indonesia yang wilayahnya merupakan bekas jajahan Belanda dengan nama Hindia-Belanda.

Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II di Asia Timur Raya, wilayah Indonesia (Hindia-Belanda) yang dikuasai oleh Jepang dari tahun 1942-1945 jatuh ketangan Sekutu. Sebelum datang Sekutu, daerah bekas jajahan Belanda yaitu Hindia-Belanda telah terlebih dahulu menyatakan kemerdekaan, dengan membentuk sebuah negara bernama Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ternyata disambut hangat oleh rakyat ditiap daerah. Pada saat Sekutu datang ke Indonesia, mereka memasuki sebuah negara baru. Tujuan kedatangan Sekutu diantaranya adalah menerima tanpa syarat kekalahan Jepang, memulangkan tentara Jepang ke tanah airnya, melucuti persenjataan

Jepang dan membebaskan tawanan sekutu (Inggris, Belanda, Australia) yang ditawan oleh Jepang.

Saat Sekutu sedang menjalankan tugasnya terjadi perselisihan antara tentara Sekutu dengan para pejuang Indonesia, di beberapa wilayah terjadi pertempuran seperti Palagan Bandung, Surabaya, Ambarawa, Karawang-Bekasi dan Bojongsokosan. Pejuang Indonesia menganggap Sekutu akan mengembalikan Indonesia dibawah kekuasaan Belanda, karena kedatangan Sekutu diikuti oleh pihak Belanda melalui NICA (*Nederland Indies Civil Administration*). Tugas NICA datang ke Indonesia adalah mengembalikan kembali kekuasaan Kerajaan Belanda atas wilayah Hindia-Belanda (NICA). Tentu saja kedatangan dan tujuan NICA mendapatkan tantangan dari rakyat Indonesia. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi ternyata diantara tokoh-tokoh Indonesia terdapat perbedaan pandangan terutama masalah perjuangan diplomasi atau kontra diplomasi, salah satu tokoh yang berbeda pandangan adalah Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Sutan Sjahrir dan Tan Malaka merupakan tokoh nasional yang berjuang melalui pemikiran dan organisasi dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyatnya. Pada masa pergerakan nasional dan pendudukan Jepang, mereka bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial tapi pasca kemerdekaan, mereka memiliki pandangan dan perbedaan yang berlainan.

4.2.1. Strategi Sutan Sjahrir

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara de facto Indonesia sudah merdeka, tetapi beberapa negara terutama negara barat mencurigai bahwa pimpinan Indonesia yaitu Ir Soekarno-Moh Hatta merupakan antek Jepang. Oleh karena itu dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No X yang berisi

Komite Indonesia Pusat diberikan wewenang untuk turut membentuk undang-undang dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Rusadi Kantaprawira, 2006 : 147). Maklumat Wakil-Presiden No. X berdampak keluar kebijakan berikutnya yaitu Maklumat Tanggal 14 Nopember 1945, yang isinya adalah membentuk kabinet parlementer, yang berdampak adanya perdana menteri dalam susunan pemerintahan RI, yaitu terpilih Sutan Sjahrir, sehingga sejak saat itu beliau duduk berjuang dalam pemerintahan, berbeda dengan Tan Malaka yang berjuang di luar pemerintahan.

Setelah dilantik sebagai perdana menteri RI pada tanggal 14 November 1945, Sutan Sjahrir mengambil inisiatif berdiplomasi dengan Belanda. Beliau ingin menangkis tuduhan bahwa Negara Indonesia hanyalah gerombolan orang butal, pembunuh dan perampok, dimana pihak Belanda selalu menuduh RI sebagai negara yang tidak aman sehingga perlu campur tangan asing. Langkah pertama yang dilakukan Sjahrir ialah dua minggu setelah menjadi perdana menteri, beliau menandatangani perjanjian dengan pasukan sekutu untuk memulangkan serdadu Jepang dan tawanan perang. Secara teknis urusan pemulangan berda dibawah Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan *Allied Prisoners of War and Internees (POPDA)*. Pada awal tahun 1946 berhasil memulangkan sekitar 36 ribu serdadu Jepang dan 28 ribu tentara sekutu. Ini merupakan bukti Indonesia mampu mengorganisasikan diri dan menghargai hukum internasional. Untuk mengangkat citra Indonesia, pada bulan Desember 1945, Sjahrir mengeluarkan keputusan tentang politik militer yang isinya semua kekuatan senjata baik tentara mau-pun laskar, harus keluar dari ibukota Jakarta. Sejak itu Kota Jakarta diumumkan sebagai kota internasional. Agar program ini lebih menarik, digelarlah pameran kesenian yang dipublikasikan oleh wartawan asing.

Selanjutnya Sjahrir memberikan bantuan beras kepada India sebanyak 500 ribu ton pada bulan Agustus 1946. Bantuan ini bertujuan meraih simpati dunia internasional terutama negara-negara Asia. Pemimpin India Jawaharlal Nehru yang sangat terpuakau atas uluran tangan Indonesia kemudian mengadakan *Asian Relation Conference* di New Delhi, India. Setelah melawat ke India, beliau berkunjung ke Mesir, Suriah, Iran dan Burma. Bantuan Beras dan kunjungan ke beberapa negara dimaksudkan sebagai upaya memperlihatkan bahwa negara Republik Indonesia tetap kokoh berdiri sendiri sebagai negara berdaulat penuh.

Selain sebagai Perdana-Menteri RI, Sutan Sjahrir juga menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpoltik yaitu mendirikan partai-partai politik untuk menghindari pertumbuhan kediktatoran. Maka kemudian di keluarkan Maklumat No 3 Nopember 1945, yang isinya pemerintah menyetujui berdirinya partai-partai politik sehingga segala paham, pendapat dan aliran rakyat dapat tersalurkan melalui partai.

Pada tanggal 11-14 November 1946, diadakanlah perundingan Linggarjati antara pemerintah RI yang di pimpin Sutan Sjahrir bersama anggotanya Moh Roem dan Soesanto Tirtoprodjo dengan pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Komisi Jenderal Schermerhorn dibantu oleh Van der Pool, de Boer dan Letnan Gubernur Van Mook. Perundingan Linggarjati berlangsung di wilayah Kuningan dengan mediator Lord Killearn (Konsulat Inggris). Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa keputusan diantaranya :

- 1). Pemerintah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura.



Gambar Sutan Sjahrir

Anwar, Rosihan.(2010). <http://buku-buku-buku.blogspot.com/2010/07/sutan-sjahrir.html>.(4 / 7 / 2011).

- 2). Pemerintah RI dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
- 3). Dibentuknya kerjasama Uni Indonesia-Belanda dibawah Ratu Belanda.

Hasil keputusan ini kemudian di tandatangani di Istana *Rijswijk*, Jakarta tanggal 25 Maret 1947 (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984 : 127).

Setelah Agresi Militer I Belanda pada 21 Juli 1947, Sutan Sjahrir berperan sebagai duta besar keliling , ia melobi pemimpin India dan Australia agar kasus Indonesia dibahas dalam rapat Dewan Keamanan PBB, dan permintaan dua negara tersebut

direspon oleh DK PBB walaupun mendapat pertentangan dari beberapa negara. Pada tanggal 14 Agustus 1947 di Lake Success, New York, Sutan Sjahrir menyampaikan pidato bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, meminta bantuan PBB untuk bertindak sebagai penengah konflik Indonesia Belanda, dan meminta agar PBB mengeluarkan putusan untuk memaksa Belanda mundur dari wilayah RI, tapi permintaan Sutan Sjahrir tidak dipenuhi.

Berdasarkan hasil deskripsi diatas, penulis berpandangan bahwa Sutan Sjahrir sangat menjunjung tinggi kebebasan rakyat dalam hal politik, beliau tidak menyukai sistem politik yang otoriter, diktator serta gaya politik partai massa karena sistem politik yang demikian lebih banyak bertumpu pada satu pemimpin politik dan sekelompok golongan. Sistem politik ini bisa menimbulkan penyelewengan-penyelewangan yang hanya menguntungkan segelintir orang tapi merugikan rakyat banyak. Bagi Sjahrir adanya kebebasan mendirikan partai-politik berarti aspirasi rakyat akan dapat tersalurkan dan ditampung sesuai dengan hak-kewajibannya masing-masing.

Sutan Sjahrir menjalankan politik diplomasi terutama bantuan beras ke India, *Asian Relation Conference* di New Delhi, India dan Perjanjian Linggarjati, hal ini kemungkinan dilakukan karena Sjahrir melihat kekuatan persenjataan Indonesia belum bisa menandingi kekuatan militer Belanda. Indonesia merupakan negara yang baru merdeka, belum kuat secara politik, ekonomi dan diplomasi. Jadi masa awal kemerdekaan menjadi waktu untuk mendapatkan dukungan internasional sebagai syarat berdirinya sebuah negara selain, wilayah, pemerintahan dan penduduk. Dukungan internasional dibutuhkan sebagai sarana menjadikan masalah Indonesia menjadi masalah internasional, yang memerlukan bantuan negara lain terutama Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB). Diharapkan diplomasi luar negeri mampu memberikan tekanan pada Belanda supaya mengakui kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tahun 1947 memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena Belanda mengakui keberadaan Indonesia, walaupun hanya seluas Sumatra, Jawa, Madura.

4.2.2 Strategi Tan Malaka

Tan Malaka merupakan tokoh fenomenal yang dikenal akan tulisan-tulisannya pada masa pergerakan nasional maupun zaman penjajahan Jepang. Tokoh yang satu ini memiliki banyak sepak terjang di luar negeri terutama Asia. Tan Malaka merupakan penganut sosialisme, yang pada perkembangannya terpengaruh oleh semangat revolusi Bolshevik Rusia. Sebagian kalangan PKI menganggap Tan Malaka sebagai penganut Komunisme Trotsky.

Pada saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, barulah Tan Malaka muncul ke permukaan panggung politik Indonesia. Beliau menawarkan konsep perjuangan “Aksi Massa”, sebuah pengerahan total kekuatan rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Beliau melihat pasca kemerdekaan rakyat Indonesia terbawa dalam euforia semangat revolusi, hal ini tentu menjadi modal besar dalam perjuangan. Modal besar itu harus dibentuk dalam satu wadah yang memiliki tujuan yang jelas dan sama, jangan sampai modal semangat rakyat yang besar kemudian terpecah-pecah oleh kepentingan kelompok maupun partai politik. Kalau sampai terjadi pengkotakan dan perpecahan maka hal ini akan melemahkan perjuangan, karena masing-masing kelompok dan partai politik hanya mementingkan kepentingannya sendiri yaitu saling berebut kekuasaan dan jabatan.

Strategi diplomasi yang diterapkan pemerintah mendapat reaksi keras dari Tan Malaka, yang menganggap diplomasi hanyalah strategi sia-sia, karena merugikan RI dan menguntungkan Belanda. Beliau memandang strategi diplomasi tidak menghormati semangat revolusi rakyat dan tentara yang bahu-membahu melawan tentara Jepang, Sekutu dan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan.



Gambar Tan Malaka

<http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com> (6 / 7 / 2011).

Untuk itu maka pada tanggal 4 sampai 15 Januari 1946 bertepatan dengan kepindahan presiden dan Wakil presiden ke Yogyakarta, bertempat di Purwokerto, Tan Malaka melakukan pertemuan dengan 141 organisasi politik, laskar perjuangan serta perwakilan Tentara Keamanan Rakyat. Hasil pertemuan tersebut melahirkan sebuah

komitmen dan wadah perjuangan bernama Persatuan Perjuangan (PP), yang saat itu resmi menjadi oposisi Kabinet Sutan Sjahrir. Persatuan Perjuangan (PP) menuntut perundingan atas dasar pengakuan kemerdekaan 100 %, Pemerintahan harus sesuai kehendak dan aspirasi rakyat, pembentukan tentara atas dasar kemauan rakyat, melucuti tentara Jepang, mengurus tawanan Eropa, menyita dan menyita tanah beserta perindustrian milik Belanda.

Organisasi PP terdiri dari Kongres, Sekretariat yang meliputi perselisihan dan politik, Badan Pekerja yang meliputi bidang ekonomi dan pertahanan. Dalam hal penyelesaian perselisihan, badan pekerja diwajibkan mengurus perselisihan internal dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa ke sekretariat yang terdiri atas pemimpin-pemimpin badan pekerja, seandainya belum selesai maka di bawa ke dalam Kongres sebagai Dewan Tertinggi dalam organisasi.

Badan Politik berkewajiban memberikan garis besar organisasi serta menyelidiki apakah anggota-anggota organisasi melakukan kewajiban menurut pedoman organisasi. Badan Politik berkewajiban mengurus dan memajukan perindustrian, pertanian, pasar serta koperasi. Badan Pekerja Pertahanan berkewajiban mengurus ketentaraan, kepolisian, pemuda, latihan jasmani dan rohani. Anggota Persatuan Perjuangan (PP) terdiri atas organisasi politik, sosial dan ketentaraan. Tiap-tiap anggota berkewajiban menjalankan keputusan Kongres, perselisihan antar anggota diserahkan kepada Badan Pekerja Penyelesaian Perselisihan.

Beberapa pokok pemikiran Tan Malaka yang dikemukakan dalam Persatuan-Perjuangan, diantaranya :

- 1). Penduduk Indonesia yang berjumlah 70 juta jiwa harus berada dibawah kedaulatan Negara Republik Merdeka.
- 2). Dengan menerima secara “ de facto” Jawa, Sumatra dan Madura, maka Republik akan menerima sekitar 50 juta penduduk, hal ini berarti hanya sekitar 70 % penduduk. Dalam hal ini Persatuan-Perjuangan (PP) menghendaki perundingan atas dasar pengakuan 100 % kemerdekaan.
- 3). Semua perkebunan (karet, kopi, kina, sisal dan lain-lain), semua tambang (minyak bumi, batu bara, timah, bauksit, emas, perak dan lainnya), pabrik (gula, besi, kain, kertas dan lain-lain), menjadi milik Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
- 4). Semua gunung, lapangan terbang yang penting bagi tentara dan Angkatan Udara, beserta berbagai persenjataan berada ditangan rakyat serta pemuda Republik (Kartasapoetra & Darmawan, 1981 : 31-33).

Pada tanggal 15-16 Januari 1946 diadakan Kongres Persatuan-Perjuangan di Solo, yang hasil keputusannya adalah pembentukan VOLKFRONT (Front Rakyat), yang akan membantu kegiatan-kegiatan Persatuan-Perjuangan. Bagi Tan Malaka, VOLKFRONT hendaknya menjadi badan perjuangan yang akan menyelesaikan pertikaian antara badan-badan, partai politik dan golongan (Kartasapoetra & Darmawan, 1981 : 34). Ide Tan Malaka itu mendapat dukungan dari berbagai pihak yang menghendaki kemerdekaan 100 %. Bahkan Moh Yamin telah berhasil menulis tentang diri Tan Malaka yaitu “ Tan Malaka Bapak Republik Indonesia”.

Ketika menyatakan bersikap oposisi terhadap pemerintah pada saat Kongres Persatuan Perjuangan di Purwokerto, Tan Malaka ditangkap dan dijebloskan dipenjara

Febby Syahputra, 2011

Wirogunan, Yogyakarta. Tapi tidak lama kemudian, pertengahan tahun 1946, beliau dibebaskan oleh Jenderal Soedirman. Saat mendekam dalam penjara beliau sempat membuat sebuah tulisan berjudul *Dari penjara ke Penjara*, sebuah buku yang memuat perjalanan dan pengalaman politik Tan Malaka. Pada tanggal 7 November 1948, Tan Malaka membentuk partai Murba, sebagai wadah perjuangan untuk meneruskan Persatuan Perjuangan. Dalam partai ini beliau memiliki gagasan perlunya kerjasama antara rakyat biasa dan kesatuan militer, yang didukung pendirian organisasi pertahanan rakyat diberbagai daerah. Markasnya terletak di Kediri, Jawa Timur, dari sini Tan Malaka melancarkan perlawanan dengan menyebarkan propaganda-propaganda berupa pamphlet yang isinya menyerukan perlawanan terhadap Sekutu dan Soekarno-Hatta, pemimpin yang tidak mau bergerilya bersama tentara dan rakyat.

Berdasarkan hasil deskripsi diatas, penulis berpandangan bahwa Tan Malaka menganggap keputusan pemerintah yang memperbolehkan pendirian partai-partai politik (multipartai) akan melemahkan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini tidak lain karena pendirian berbagai macam partai-politik akan membuat masyarakat terpecah-pecah dalam berbagai macam golongan, dimana tiap-tiap golongan memiliki tujuan yang berbeda-beda sehingga berdampak pada melemahnya perjuangan karena tidak ada kesamaan prinsip dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu maka harus dibuat suatu wadah perjuangan untuk menampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yaitu Persatuan-perjuangan (PP). PP ini akan menjadi alat pemersatu bagi partai-politik, organisasi dan kelaskaran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Persatuan Perjuangan (PP) berusaha dan berjuang untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh penjajahan seperti menuntut kemerdekaan 100 %, maksudnya semua wilayah jajahan Belanda harus diserahkan kepada Indonesia tanpa terkecuali seperti Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Irian Barat. PP juga memperjuangkan pengambilalihan (nasionalisasi) semua aset-aset milik Belanda seperti pabrik, kantor, perkebunan, pertambangan, lapangan-udara dan sebagainya yang ada di Indonesia. Aset-aset yang telah dinasionalisasi akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3. Pengaruh Perjuangan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka terhadap Kondisi Sosial-Politik Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1948

Perbedaan strategi perjuangan antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka pada masa mempertahankan kemerdekaan berakibat pada ketidakstabilan politik Indonesia terutama pada tahun 1945-1948. Pasca kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Moh Hatta. Pasca Proklamasi tersebut Bangsa Indonesia mendapatkan ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Ancaman luar yang mengganggu kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah munculnya kontak senjata dengan tentara Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pejuang Republik Indonesia. Selain dari Jepang, kemerdekaan Indonesia mendapatkan ancaman dari Sekutu (Inggris) dan Belanda, bahkan Belanda tidak mengakui kemerdekaan RI dan tetap menganggap RI merupakan wilayah jajahannya di Asia. Kontak senjata dengan sekutu dan Belanda terjadi di berbagai tempat

seperti Pertempuran Surabaya, Karawang-Bekasi, Bojongkokosan, Medan-Area, Ambarawa, Bandung dan daerah lainnya.

Selain ancaman dari luar, Indonesia juga menghadapi ancaman dari dalam negeri yaitu pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia terpecah belah menjadi dua, hal ini dikarenakan sebagian pihak ingin berjuang melalui diplomasi sedangkan yang lain ingin berjuang dengan senjata dan revolusioner. Tokoh yang menonjol dalam perjuangan diplomasi adalah Sutan Sjahrir yang menjabat sebagai perdana menteri, dan penentangannya yang menolak perjuangan diplomasi yaitu Tan Malaka yang membentuk Persatuan-Perjuangan (PP) (Kartasapoetra & Darmawan, 1981 :29).

Sutan Sjahrir yang pasca proklamasi menjadi perdana menteri, memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan Indonesia, khususnya dalam hal hubungan dengan Belanda terutama menyangkut penyelesaian sengketa antar kedua negara. Sebagai perdana menteri beliau merumuskan kebijakan perundingan dengan pihak Belanda, terutama perundingan Linggarjati. Tentu perundingan Linggarjati menyebabkan rakyat Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku dan Irian Barat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara boneka Belanda atau langsung di bawah kendali Belanda. Selain itu juga dibentuk negara federasi bernama Negara Indonesia Serikat dan pembentukan Uni Indonesia-Belanda.

Tindakan Sjahrir dalam perjanjian Linggarjati mendapatkan tantangan dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan kontra. Terutama dari kalangan parlemen yang kontra terhadap hasil perundingan Linggarjati, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata, sedangkan yang mendukung adalah PKI,

Pesindo, BTI, Laskar rakyat, Partai Buruh, Parkindo, Partai Katolik. Penolakan perundingan Linggarjati yang sangat kuat juga dilakukan oleh Tan Malaka. Beliau kemudian merangkul semua organisasi, laskar dan tentara yang kontra terhadap PM Sjahrir.

Dalam menghadapi kelompok Sjahrir, Tan Malaka membentuk wadah perjuangan bernama Persatuan-Perjuangan yang diselenggarakan pada tanggal 4 - 15 Januari 1946 di Purwokerto. Dalam Kongres Persatuan perjuangan hadir sekitar 141 perwakilan dari berbagai organisasi politik, kelaskaran dan organisasi masyarakat. Nuansa ketidakpuasan menyelimuti kongres. Para peserta tidak sepakat dengan langkah diplomasi Soekarno - Hatta serta Perdana Menteri Sjahrir. Tan Malaka sangat geram dengan pemimpin yang tidak bereaksi atas masuknya sekutu ke Indonesia. Bagi Tan Malaka, orang tak akan berunding dengan maling dirumahnya. “ Selama masih ada satu orang musuh di tanah air, satu kapal musuh di pantai, kita harus tetap melawan (Tempo, 2008 : 42). Setelah bendera oposisi berkibar di Purwokerto, Tan Malaka akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan, Yogyakarta tapi kemudian dibebaskan oleh Jenderal Soedirman pada bulan Juli 1946, dan kemudian bergerilya ke berbagai daerah serta membentuk Partai Murba.

Perbedaan pandangan antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, dimana perbedaan antara kedua tokoh ini mengakibatkan kekuatan perjuangan terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Ini tentu saja melemahkan perjuangan Indonesia, yang pada awal kemerdekaan sedang terpusat perhatian menghadapi ancaman luar seperti Sekutu (Inggris) dan Belanda. Kalangan tentara Indonesia juga tidak setuju dengan

strategi diplomasi perdana menteri Sjahrir, sehingga mereka ikut ke kelompok Persatuan-Perjuangan Tan Malaka. Kelompok tentara dibawah pimpinan Jenderal Soedirman menganggap strategi diplomasi sangat melemahkan dan merugikan Indonesia, dimana banyak wilayah yang jatuh ke tangan Belanda.

Dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Persatuan-Perjuangan dibawah pimpinan Tan Malaka mengakibatkan gerakan oposisi terhadap Sutan Sjahrir semakin menguat sehingga mengakibatkan kejatuhan Kabinet Sjahrir, akan tetapi Presiden Soekarno tetap menunjuk kembali Sjahrir sebagai Formatur kabinet sehingga tersusun Kabinet Sjahrir II. Sebetulnya Tan Malaka sebelumnya ditawarkan Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet baru, tetapi Persatuan-Perjuangan mengajukan syarat bahwa tawaran akan diterima apabila program mereka diterima dan dijalankan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja sulit dilaksanakan sehingga Presiden Soekarno menyerahkan pembentukan kabinet kepada Sutan Sjahrir (Kartasapoetra & Darmawan, 1981 : 36).

Perpecahan di kalangan pemimpin RI baik yang duduk dalam pemerintahan maupun yang berada diluar pemerintahan makin hari makin memuncak, sehingga mencapai puncaknya dengan diculiknya Sutan Sjahrir, Ir Darmawan Mangunkusumo (Menteri kemakmuran), Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Mereka diculik oleh tentara dibawah pimpinan Jenderal Mayor Sudarsono pada tanggal 27 menjelang 28 Juni 1946. Atas kejadian itu Presiden Soekarno atas nama Pemerintah pusat mengumumkan pada tanggal 28 Juni 1946 mengumumkan Negara Indonesia dalam keadaan bahaya, pengumuman ini ditandatangani oleh Presiden

Soekarno dan Menteri Pertahanan Amir Syarifudin atas nama Dewan Menteri (Kartasapoetra & Darmawan, 1981 : 37).

Pada tanggal 20 Juni 1946 jam 20.00 WIB, Presiden menyampaikan pidato di radio. Beliau berbicara mengenai permasalahan negara, pemerintah dan gerakan oposisi yang perlu mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Rupa-rupanya pidato Presiden Soekarno tanggal 30 Juni didengar oleh penculik, sehingga kemudian Sjahrir dan pejabat lain yang diculik dibebaskan sekitar jam 04.00. Pemerintah akhirnya mengetahui dalang penculik tersebut yaitu Panglima Divisi III Mayor Jenderal Soedarsono, perintah penangkapan diberikan kepada Letkol Soeharto, Komandan Resimen Yogyakarta. Berbekal surat perintah yang ditandatangani Panglima Besar Jenderal Soedirman, Letkol Soeharto menangkap rombongan Jenderal Mayor Soedarsono yang saat itu tiba di Istana Negara, Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa 3 Juli 1946 (Nasution, 1977 : 336-340).

Selain menyebabkan terpecahnya perjuangan kepada dua kubu yang pro Sutan Sjahrir maupun pro Tan Malaka. Konflik internal yang terjadi antara Sjahrir dan Tan Malaka membuat konsentrasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk kemakmuran rakyat tidak maksimal dan cenderung hal ini terbengkalai, apalagi Indonesia yang baru merdeka harus menghadapi Sekutu (Inggris) dan Belanda. Boleh dikatakan bahwa pasca kemerdekaan pembangunan untuk masyarakat tidak berjalan, hal ini karena Indonesia dalam tahap mempertahankan kemerdekaan untuk berjuang melawan ancaman yang datang dari luar selain konflik internal yang muncul akibat perbedaan pemikiran politik dan strategi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kondisi perpecahan internal yang dialami oleh Indonesia, kemudian dimanfaatkan oleh Belanda

dengan menjalankan Agresi Militer I tahun 1947 yang bertujuan merebut wilayah RI yang kaya akan sumber daya alam, seperti Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Jawa Tengah bagian utara, Bangka-Belitung, Pulau Madura serta Agresi Militer II yang dilancarkan pada tahun 1948 dan berhasil merebut ibukota Yogyakarta. Belum lagi Peristiwa Madiun yang dipimpin oleh Musso dengan mendirikan Republik Soviet Sosialis Indonesia bulan September 1948, dan penumpasannya dilakukan secara militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Peristiwa Madiun Tahun 1948, merupakan antiklimaks bagi seorang tokoh Tan Malaka, dimana pasca peristiwa tersebut, beliau meninggal ditembak oleh tentara, walaupun sebetulnya Tan Malaka tidak mendukung Peristiwa Madiun 1948. Beliau tertembak di daerah Selopanggung pada tanggal 21 Februari 1949. Tan Malaka tertembak oleh pasukan Batalyon Sikatan, Divisi IV Jawa Timur, pimpinan Letnan Soekotjo. Setelah kematian Tan Malaka, partai Murba yang sempat didirikannya setelah keluar dari penjara, mengalami kemerosotan dan kemunduran seperti pada Pemilu tahun 1955, partai yang didirikan Tan Malaka hanya meraih 2 kursi dari 257 kursi yang tersedia. Walaupun demikian idenya mengenai kerjasama pertahanan rakyat dengan tentara saat bergerilya dan mendirikan partai Murba, dianggap oleh Jenderal A.H Nasution sebagai cikal bakal sistem pertahanan semesta rakyat yang sukses dalam bergerilya menghadapi agresi militer I dan II Belanda (Tempo, 2008 : 42).

Sementara itu, nasib yang sama juga dialami oleh Sutan Sjahrir, setelah mengundurkan diri dari pemerintahan tanggal 27 Juni 1947, beliau berkonsentrasi membesarkan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tapi partai pimpinan Sjahrir ini tidak bisa bersaing dengan partai lain seperti PNI, Masyumi, NU dan PKI. Pada Pemilu tahun 1955,

PSI hanya mendapatkan 5 kursi DPR dan 10 kursi Konstituante. Tentu hal ini menggambarkan bahwa PSI tidak memiliki pengaruh kuat dalam parlemen dan hanya merupakan partai kecil.

Pada akhir tahun 1950an, di Indonesia terjadi Gerakan PRRI / Permesta, tapi tidak lama kemudian gerakan tersebut berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat. Pasca pemberontakan ini, pimpinan PSI termasuk Sjahrir dipanggil oleh Presiden Soekarno, hal ini dikarenakan ada tokoh PSI yang ikut mendukung PRRI. Presiden Soekarno kemudian membubarkan PSI pada tanggal 17 Agustus 1960. Tahun 1962, Sjahrir dan beberapa pimpinan PSI lainnya dijadikan tahanan politik. Saat menjalani masa tahanan, Sjahrir menderita sakit, dan diizinkan berobat ke Zurich, Swiss. Tapi pengobatan keluar negeri ternyata tidak dapat menyelamatkan nyawanya, akhirnya beliau menghembuskan nafasnya tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss.